



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 3593);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 76.255.815.942.942 (tujuh puluh enam triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari :
  - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan
  - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp. 9.837.795.158.086 (sembilan triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah).
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) terdiri dari :
  - a. Penerimaan pajak sebesar Rp. 37.258.138.078.932 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
  - b. Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp. 7.053.358.287.016 (tujuh triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam belas rupiah);
  - c. Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 15.673.837.720.778 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - d. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 6.432.686.698.130 (enam triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut pada Penjelasan pasal ini.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 74.760.742.755.057 (tujuh puluh empat triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari :

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp. 44.069.055.957.310 (empat puluh empat triliun enam puluh sembilan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dirinci menurut sektor :

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	45.805.151.738
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	1.057.039.429.508
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	21.925.254.018
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	90.945.914.300
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	23.523.644.238.501
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	194.828.256.618
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	81.780.827.788
08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	18.470.244.673
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	7.532.772.963.682
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	130.249.360.804
11 SEKTOR PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	2.697.332.363.950
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	177.198.457.607



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13 SEKTOR...

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	377.001.139.647
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	9.845.339.545
15 SEKTOR AGAMA	Rp	777.273.625.426
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	230.298.541.387
17 SEKTOR HUKUM	Rp	431.115.949.787
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	1.974.452.492.630
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	800.592.901.990
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	3.896.483.503.711

b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 30.691.686.797.747  
(tiga puluh triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar enam  
ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh  
ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dirinci menurut sektor  
:

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	565.021.253.641
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	1.657.067.601.537
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	1.927.671.539.418
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	109.043.460.959
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	1.447.421.496.448
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	5.658.296.427.710



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

		07 SEKTOR...
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	4.407.331.482.500
08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	973.227.513.726
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	5.461.547.213.663
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	130.249.360.804
11 SEKTOR PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	2.989.009.379.488
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	269.873.458.046
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	987.301.899.265
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.	Rp	1.133.131.063.324
15 SEKTOR AGAMA	Rp	165.688.444.760
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	387.731.878.270
17 SEKTOR HUKUM	Rp	90.759.168.842
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PENGAWASAN Rp 569.016.723.577

19 SEKTOR...

19 SEKTOR POLITIK,  
HUBUNGAN LUAR  
NEGERI, PENERANGAN,  
KOMUNIKASI  
SOSIAL DAN MEDIA MASSA Rp 219.248.193.970

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN  
KEAMANAN Rp 1.278.035.601.633

- (2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tersebut pada Penjelasan pasal ini.

### Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 1.495.073.187.885 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

### Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar...  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Januari 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Januari 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS  
NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp. 1.495.073.187.885 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1993/1994 menjadi sebesar Rp. 2.305.608.123.865 (dua triliun tiga ratus lima miliar enam ratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 3.800.681.311.750 (tiga triliun delapan ratus miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dalam jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp. 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

- a. Cukup jelas
- b. Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut:

### RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1994/1995

(dalam rupiah)

Penerimaan Pajak	37.258.138.078.932
0110 Pajak Penghasilan (PPh)	18.764.075.692.995
0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16.544.750.663.232
0130 Pajak lainnya	301.977.379.072
0134 Bea meterai	222.737.746.221
0135 Bea lelang	79.239.632.851
0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.647.334.343.633
Penerimaan bea masuk dan cukai	7.053.358.287.016
0210 Penerimaan bea masuk	3.900.063.999.709
0220 Penerimaan cukai	3.153.294.287.307
0221 Cukai tembakau	2.647.480.314.310
0222 Cukai gula	417.403.555.021
0223 Cukai bir	71.540.324.909
0224 Cukai alkohol sulingan	16.870.093.067
Penerimaan lain-lain	15.673.837.720.778
0311 Penerimaan minyak bumi dan gas alam	13.537.416.659.565
0314 Pajak ekspor, pungutan ekspor	130.581.718.778



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	0315	Penerimaan...	
0315		Penerimaan dari laba bersih minyak	2.005.839.342.435
		Penerimaan bukan pajak	6.432.686.698.130
0320		Penerimaan bukan pajak di luar negeri	12.981.922.174
0330		Penerimaan khusus	1.722.071.821.495
0331		Penerimaan khusus pembagian laba dari perusahaan negara, Bank Pemerintah, BUMN	1.322.071.821.495
0332		Penerimaan lain-lain (penerimaan kembali pinjaman)	400.000.000.000
0410		Penerimaan pendidikan	282.760.218.274
0411		Uang pendidikan	269.552.923.886
0412		Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan	13.207.294.388
0510		Penerimaan penjualan	47.854.011.762
0511		Penjualan hasil pertanian, perkebunan	658.369.136
0512		Penjualan hasil peternakan	746.285.287
0513		Penjualan hasil perikanan	239.860.069
0514		Penjualan hasil sitaan, rampasan	7.728.247.661
0515		Penjualan rumah, tanah	4.860.108.618
0516		Penjualan barang yang telah di hapuskan, yang berlebih, yang rusak	2.227.251.656
0517		Penjualan obat-obatan, vaksin, hasil farmasi lainnya	63.900.229
0518		Penjualan penerbitan, potret, film, poster, gambar, peta	228.337.657
0519		Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	9.389.337.105
0521		Penjualan kendaraan bermotor	879.278.274
0522		Penjualan sewa beli	16.082.389.679
0523		Penjualan lain-lain	4.750.646.391
0600		Penerimaan sewa dan jasa	1.877.610.150.776
0610		Penerimaan sewa	18.660.826.949
0611		Sewa rumah negeri, rumah dinas	4.505.092.272



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

	0612 Sewa...
0612 Sewa gedung	1.192.128.507
0613 Sewa benda-benda tak ber gerak lainnya	2.424.475.321
0614 Sewa benda-benda bergerak (alat-alat berat kendaraan bermotor)	6.857.269.599
0615 Sewa lainnya	3.681.861.250
0620 Penerimaan jasa	1.858.949.323.827
0621 Penerimaan rumah sakit dan instansi, kesehatan lainnnya	6.574.361.934
0622 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum	215.946.403
0623 Pemberian surat keterangan	66.457.114.990
0624 Penerimaan sertipikat pendaftaran tanah	75.811.172.913
0625 Pemberian hak dan perijinan	153.726.456.067
0626 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	5.421.817.438
0627 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan	29.215.300.478
0628 Penerimaan jasa dalam urusan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTPCR)	4.692.515.273
0629 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan	19.074.673.329
0630 Penerimaan jasa lembaga ke-uangan (jasa giro)	44.498.040.210
0631 Penerimaan iuran hasil hutan, laut, royalti, denda	263.085.472.038
0632 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	2.700.869.287
0633 Penerimaan jasa kantor catatan sipil	10.677.812.487
0634 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	907.851.836
0635 Penerimaan jasa lainnya	1.175.454.306.268
0710 Penerimaan kejaksaan dan peradilan	28.886.398.387
0711 Legalisasi tanda tangan	69.463.891
0712 Pengesahan surat di bawah tangan	22.772.775
0713 Uang meja (leges)	474.951.261
0714 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	21.530.300.961
0715 Ongkos perkara	1.960.759.079



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	0716	Penerimaan...	
	0716	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	4.828.150.420
	0800	Penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain	2.460.522.175.262
	0810	Penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu	5.259.269.744
	0811	Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO berdasarkan SPMU-DO)	5.259.269.744
	0830	Penerimaan lain-lain	2.455.262.905.518
	0831	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	5.701.238.094
	0832	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	8.144.816.568
	0833	Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	9.253.650.225
	0834	Penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan (SIAR)	29.281.599.099
	0835	Penerimaan anggaran pembangunan yang tidak digunakan (SIAP)	7.140.153.026
	0836	Penerimaan anggaran lainnya	2.182.079.814.773
	0837	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM Nihil KPKN	206.104.674.778
	0838	Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar gaji, pensiun daerah otonom (tanpa memandang tahun anggaran kapan penyeteran dilakukan)	7.556.958.955
	0839	Penerimaan kembali pensiun daerah otonom --	
	J U M L A H		66.418.020.784.856

RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

(dalam rupiah)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0910	Bantuan Program	--
		0920 Bantuan...
0920	Bantuan Proyek	9.837.795.158.086
	J U M L A H	9.837.795.158.086

### Pasal 2

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:

#### RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1994/1995

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	45.805.151.738
	Jumlah Sektor Industri	45.805.151.738
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KE-HUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	91.448.907.473
02.2	Subsektor Kehutanan	965.590.522.035
	Jumlah Sektor Pertaniandan Kehutanan	1.057.039.429.508
03	SEKTOR PENGAIRAN	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	8.829.823.828
03.2	Subsektor Irigasi	13.095.430.190
	Jumlah Sektor Pengairan	21.925.254.018
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	90.945.914.300
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	90.945.914.300
05	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEM-BANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	45.919.032.205
		05.2 Subsektor...
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	17.210.330.420
05.4	Subsektor Keuangan	23.390.053.468.008
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	70.461.407.868
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	23.523.644.238.501
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	14.893.205.510
06.2	Subsektor Transportasi Darat	14.226.210.532
06.3	Subsektor Transportasi Laut	103.298.923.015
06.4	Subsektor Transportasi Udara	36.648.286.011
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Pe-nyelamatan (SAR)	25.761.631.550
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	194.828.256.618
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1	Subsektor Pertambangan	79.139.472.058
07.2	Subsektor Energi	2.641.355.730
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	81.780.827.788
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	11.108.579.407
08.2	Subsektor Pos dan Tele-komunikasi	7.361.665.266
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	18.470.244.673
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	7.486.119.729.493
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	46.653.234.189
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	7.532.772.963.682
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	3.595.878.827
		10.2 Subsektor...
10.2	Subsektor Tata Ruang	126.653.481.977
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	130.249.360.804
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	2.472.763.797.266
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	166.072.609.576
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	52.195.271.793
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	6.300.685.315
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	2.697.332.363.950
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KE-LUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	177.198.457.607
	Jumlah sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	177.198.457.607
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	64.534.302.160
13.2	Subsektor Kesehatan	312.466.837.487
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	377.001.139.647
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PER-MUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	6.936.695.761
14.2	Subsektor Penataan kota dan Bangunan	2.908.643.784
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	9.845.339.545
15	SEKTOR AGAMA	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

		15.1 Subsektor...
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	145.089.770.084
15.2	Subsektor Pembinaan Pen-didikan Agama	
	Jumlah Sektor Agama	777.273.625.426
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	157.432.442.545
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasa-rana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	18.334.489.364
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	902.785.910
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	53.628.823.568
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	230.298.541.387
17	SEKTOR HUKUM	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	373.786.722.134
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	57.329.227.653
	Jumlah Sektor Hukum	431.115.949.787
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1	Subsektor Aparatur Negara	1.824.596.067.985
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	149.856.424.645
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	1.974.452.492.630
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNI-KASI DAN MEDIA MASSA	
19.1	Subsektor Politik	47.701.555.825
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	522.084.108.247
19.3	Subsektor Penerangan, Komuni-kasi dan Media Massa	200.807.237.918
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan Komunikasi dan Media Massa	800.592.901.990





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KE-AMANAN

20.2	Subsektor ABRI	20.2 Subsektor...	3.896.483.503.711
20.3	Subsektor Pendukung	--	
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan		3.896.483.503.711
	Jumlah Pengeluaran Rutin		44.069.055.957.310

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN  
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI

01.1	Subsektor Industri	223.542.870.901
	Jumlah Sektor Industri	223.542.870.901

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KE-HUTANAN

02.1	Subsektor Pertanian	1.346.114.154.863
02.2	Subsektor Kehutanan	5.148.140.549
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	1.351.262.295.412

03 SEKTOR PENGAIRAN

03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	457.256.197.041
03.2	Subsektor Irigasi	542.604.124.507
	Jumlah Sektor Pengairan	999.860.321.548

04 SEKTOR TENAGA KERJA

04.1	Subsektor Tenaga Kerja	104.853.395.546
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	104.853.395.546

05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEM-BANGAN  
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	16.998.897.414
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	573.688.827.247
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	489.295.406.019
		05.4 Subsektor...
05.4	Subsektor Keuangan	3.654.711.072
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	55.149.490.965
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	1.138.787.332.717
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEORO-LOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.191.060.214.693
06.2	Subsektor Transportasi Darat	288.943.387.719
06.3	Subsektor Transportasi Laut	228.594.837.883
06.4	Subsektor Transportasi Udara	196.841.195.096
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	16.223.550.902
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	3.921.663.186.293
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1	Subsektor Pertambangan	34.319.726.936
07.2	Subsektor Energi	1.397.980.936.750
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	1.432.300.663.686
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	34.780.833.746
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	265.092.694.961
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	299.873.528.707
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	4.470.029.103.682
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	752.834.924.998
	Jumlah Sektor Pembangunan Da-erah dan Transmigrasi	5.222.864.028.680



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	202.735.235.472
10.2	Subsektor Tata Ruang	49.866.794.008
		Jumlah...
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	252.602.029.480
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	2.222.144.708.331
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	106.490.821.015
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	49.767.686.120
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	30.662.059.105
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	2.409.065.274.571
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KE-LUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	221.605.331.662
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	221.605.331.662
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	77.714.341.795
13.2	Subsektor Kesehatan	761.694.819.650
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	890.000
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	839.410.051.445
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PER-MUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	581.800.245.881



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

14.2	Subsektor Penataan kota dan Bangunan	32.518.971.563
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	614.319.217.444

15 SEKTOR...

15 SEKTOR AGAMA

15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	66.396.844.441
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	92.924.361.605
	Jumlah Sektor Agama	159.321.206.046

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	112.851.053.595
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	47.968.073.440
16.3	Subsektor Kelembagaan Pra-sarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	60.482.449.346
16.4	Subsektor Kelautan	30.871.433.964
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	17.598.743.544
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	88.445.497.552
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	358.217.251.441

17 SEKTOR HUKUM

17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	8.577.600.226
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	27.380.551.522
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	54.629.531.730
	Jumlah Sektor Hukum	90.587.683.478

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN

18.1	Subsektor Aparatur Negara	383.427.379.786
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	35.611.302.857
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	419.038.682.643

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

19.1	Subsektor Politik	3.626.403.057
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	3.411.881.882
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

dan Media Massa	116.280.541.086
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan Komunikasi dan Media Massa	123.318.825.965
	20 SEKTOR...
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KE-AMANAN	
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	103.800.556.551
20.2 Subsektor ABRI	567.597.905.445
20.3 Subsektor Pendukung	--
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	671.398.461.996
J U M L A H	20.853.891.639.661

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN  
BANTUAN PROYEK/TEKNIS  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI	
01.1 Subsektor Industri	341.478.382.740
Jumlah Sektor Industri	341.478.382.740
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1 Subsektor Pertanian	299.403.233.903
02.2 Subsektor Kehutanan	6.402.072.222
Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	305.805.306.125
03 SEKTOR PENGAIRAN	
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	304.355.942.821
03.2 Subsektor Irigasi	623.455.275.049
Jumlah Sektor Pengairan	927.811.217.870
04 SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	4.190.065.413
Jumlah Sektor Tenaga Kerja	4.190.065.413
05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	--
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	--
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	276.357.650.516
05.4	Subsektor Keuangan	32.276.513.215
		05.5 Subsektor...
05.5	Subsektor Koperasi dan Peng-usaha Kecil Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasio nal, Keuangan dan Koperasi	--  308.634.163.731
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	1.135.818.804.381
06.2	Subsektor Transportasi Darat	378.462.734.533
06.3	Subsektor Transportasi Laut	119.970.272.242
06.4	Subsektor Transportasi Udara	102.381.430.261
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Jumlah Sektor Transportasi, Meteorolgi dan Geofisika	--  1.736.633.241.417
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1	Subsektor Pertambangan	32.083.001.153
07.2	Subsektor Energi Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	2.942.947.817.661  2.975.030.818.814
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	630.000
08.2	Subsektor Pos dan Tele komunikasi Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	673.353.355.019  673.353.985.019
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	118.852.503.171
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	119.830.681.812  238.683.184.983
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	124.922.477.968
10.2	Subsektor Tata Ruang	17.648.489.522
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	142.570.967.490
		11 SEKTOR...
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHA-DAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	503.796.782.474
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	76.176.122.352
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	59.629.091
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	1.571.000
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga -	580.034.104.917
12	SEKTOR KEPENDUDUK AN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	48.268.126.384
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	48.268.126.384
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	13.167.062.540
13.2	Subsektor Kesehatan	134.724.785.280
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	--
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	147.891.847.820
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PER-MUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	516.755.930.507
14.2	Subsektor Penataan kota dan Bangunan	2.055.915.373
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	518.811.845.880



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

15	SEKTOR AGAMA	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	25.894.360
		15.2 Subsektor...
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	6.341.344.354
	Jumlah Sektor Agama	6.367.238.714
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	8.565.636.467
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	11.255.581.128
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3.662.099.737
16.4	Subsektor Kelautan	3.021.169.363
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	--
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	3.010.140.134
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	29.514.626.829
17	SEKTOR HUKUM	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	--
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum -	142.645.773
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	28.839.591
	Jumlah Sektor Hukum	171.485.364
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1	Subsektor Aparatur Negara	133.929.618.104
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	16.048.422.830
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	149.978.040.934
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNI-KASI DAN MEDIA MASSA	
19.1	Subsektor Politik	10.890.637.076





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	--
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	85.038.730.929
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan Komunikasi dan Media Massa	95.929.368.005
		20 SEKTOR...
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	--
20.2	Subsektor ABRI	606.637.139.637
20.3	Subsektor Pendukung	--
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	606.637.139.637
	J U M L A H	9.837.795.158.086

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3666